



KRISIS RASIONALITAS DAN POLARISASI SOSIAL DALAM DIALOG PUBLIK DI MEDIA SOSIAL INDONESIA AKIBAT BUDAYA WOKE

Devi Wulandari¹, Rita Elviany², Dany Miftahul Ula³

^{1,2,3}Universitas Insan Budi Utomo

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

Kata kunci: Budaya Woke, Krisis Rasionalitas, Media Sosial, Polarisasi Sosial



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Budaya woke, yang muncul dari hasrat untuk keadilan sosial, telah mengalami perubahan saat memasuki ranah digital. Di platform media sosial, budaya ini berkembang menjadi norma moral baru yang sangat agresif, sering kali menolak berbagai pandangan dan mengurangi ruang untuk diskusi publik yang sehat. Fenomena seperti cancel culture, simbolisme moral, dan dorongan untuk menjalin afiliasi ideologis menciptakan suasana komunikasi yang penuh emosi, eksklusif, dan tidak menerima ketidakpastian. Di dalam ekosistem algoritmik yang memperkuat polarisasi serta memprioritaskan konten yang viral, narasi yang lebih kompleks sering kali tergantikan oleh pernyataan moral yang sederhana dan cepat dicerna. Akibatnya, kebebasan berekspresi semakin menyusut, sementara pola logika argumen terpinggirkan oleh performa identitas di dunia maya. Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus digital dengan menganalisis wacana

kritis dari konten dan komentar di Instagram, untuk memahami struktur kekuasaan dan ideologi dalam komunikasi online. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan literasi digital, tekanan simbolis, dan struktur algoritmik di media sosial menjadi penyebab utama krisis rasionalitas dan peningkatan polarisasi sosial di Indonesia.

PENDAHULUAN

Media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi di ruang publik. Situs-situs seperti Twitter, Instagram, dan TikTok bukan hanya alat hiburan, tetapi juga tempat untuk berdiskusi tentang isu sosial dan politik. Namun, pola komunikasi di media sosial lebih dipengaruhi oleh kecepatan, keterlibatan, dan popularitas, daripada kedalaman dan rasionalitas. Seiring waktu, media sosial menunjukkan tanda-tanda bahwa batas antara fakta dan pendapat semakin kabur. Dalam buku Politik Identitas melalui Media Sosial (2023), dijelaskan bahwa pergeseran dalam cara komunikasi ini sangat mempengaruhi tatanan moral dan budaya masyarakat saat ini.

Salah satu bentuk yang paling jelas dari perubahan ini adalah berkembangnya budaya woke di dunia digital. Budaya ini dimulai dari kesadaran akan ketidakadilan, tetapi dalam

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp 1-20

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

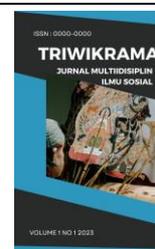


praktiknya sering kali berubah menjadi bentuk moralitas yang agresif. Tindakan penghakiman bersama melalui cancel culture adalah contoh bagaimana budaya woke beroperasi dengan logika yang menolak pendapat yang berbeda. Alih-alih menciptakan ruang dialog yang konstruktif, budaya ini sering kali membuat perbedaan semakin tajam dan menghalangi pertukaran pandangan. Fenomena ini secara langsung memengaruhi suasana komunikasi publik yang kehilangan unsur deliberatifnya.

Ruang publik digital kini semakin terbelah: ada ‘yang benar’ dan ‘yang salah’, tanpa ruang abu-abu untuk diskusi mendalam. Algoritma media sosial memperkuat polarisasi sosial dengan menampilkan konten sesuai dengan keinginan pengguna, yang menghasilkan lingkungan ideologis yang seragam. Dalam situasi ini, rasionalitas tidak lagi berperan sebagai alat utama untuk menentukan kebenaran, melainkan kesetiaan terhadap narasi atau kelompok tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Rahmawati (2018), meningkatnya risiko polarisasi sosial terjadi ketika algoritma digital tidak mendorong transparansi informasi. Kondisi ini memperparah pemisahan kognitif dalam masyarakat.

Budaya woke kemudian muncul sebagai norma moral baru dalam menilai berbagai masalah sosial, budaya, dan politik. Di balik niatnya yang progresif, terdapat kecenderungan untuk mengklaim kebenaran serta mengabaikan pihak yang tidak sejalan. Akibatnya, kualitas argumen dalam diskusi publik menurun. Diskusi yang seharusnya menjadi tempat belajar dan bertukar ide berubah menjadi pertarungan emosional. Banyak pengguna sulit membedakan antara narasi yang didasarkan pada data dan opini yang bersifat retorik. Akibatnya, informasi yang bersifat emosional dan ideologis lebih cepat menyebar dibandingkan narasi yang faktual dan rasional. Anshori dan Hidayat (2024) mengamati bahwa kondisi ini menciptakan masyarakat digital yang mudah terpengaruh oleh arus opini tanpa proses verifikasi. Hal ini membuat ruang publik digital semakin kurang mendukung untuk membangun diskusi yang sehat dan produktif.

Sebagian besar orang yang menggunakan media sosial cenderung lebih memperhatikan simbol nilai dan identitas kelompok ketimbang logika argumen. Hal ini terlihat dari banyaknya ekspresi moral yang muncul dalam bentuk meme, hashtag, dan komentar yang mendukung tindakan tertentu sesuai dengan norma kelompok. Proses dialog kini lebih sering digantikan oleh sikap saling menyerang dan penciptaan musuh bersama. Ini menunjukkan perubahan



komunikasi publik dari yang bersifat rasional menjadi emosional. Nurudin (2004) menyebut situasi ini sebagai penurunan kualitas komunikasi massa di era digital.

Sementara itu, media sosial itu sendiri memiliki struktur yang secara alami lebih mendukung ekspresi emosional daripada kognitif. Sistem like, share, dan komentar lebih menghargai tanggapan yang cepat dan emosional dibandingkan dengan argumen yang panjang dan reflektif. Dalam sistem semacam ini, pengguna yang menyampaikan pandangan yang rumit sering kali terabaikan karena dianggap tidak menarik atau kurang populer. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika budaya woke lebih mendominasi, karena menyediakan narasi yang sederhana, moralistik, dan mudah dieksploitasi secara sosial. Kondisi ini menciptakan generasi pengguna media sosial yang tidak hanya terpecah, tetapi juga mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai keberlangsungan demokrasi deliberatif di ruang publik digital. Jika budaya woke terus berkuasa tanpa adanya pengendalian naratif dan tanpa usaha untuk merekonstruksi ruang diskusi yang rasional, maka krisis rasionalitas dalam masyarakat akan semakin parah. Polarisasi sosial yang sangat ekstrem bisa mengancam kohesi sosial dan menghambat kemampuan kolektif untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Oleh sebab itu, peneliti merasa bahwa sangat perlu untuk menganalisis dengan cermat cara pembentukan dan fungsi budaya woke di ruang digital, serta pengaruhnya terhadap kualitas percakapan publik dan rasionalitas bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika budaya woke dalam lingkungan media sosial guna memahami tantangan dan konsekuensi yang muncul terhadap praktik komunikasi publik yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus digital yang berfokus pada konten serta komentar di platform Instagram. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis secara mendalam cara narasi budaya woke berfungsi dalam interaksi publik yang nyata. Media sosial menyajikan arena diskursif yang dinamis, yang mencerminkan perubahan opini, konflik ideologis, serta polarisasi sosial dalam bentuk yang nyata. Metode ini juga relevan untuk memahami bagaimana pengguna merundingkan identitas serta rasionalitas mereka di dalam

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp 1-20

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



ruang digital. Seperti yang dijelaskan oleh Ridwan (2022), media sosial berfungsi sebagai arena yang sangat politis dan kaya akan makna simbolik.

Sumber data utama diambil dari dokumentasi konten Instagram seperti unggahan, caption, dan kolom komentar yang berisi diskusi publik mengenai isu sosial, identitas, atau moralitas. Peneliti fokus pada akun-akun publik dengan banyak pengikut yang sering mendiskusikan tema kontroversial sebagai contoh gender, agama, hak minoritas, dan lingkungan. Dari akun-akun tersebut, peneliti memilih 3 hingga 5 unggahan yang memicu diskusi hangat di komentar, khususnya yang memperlihatkan polarisasi opini seputar budaya woke. Komentar yang dianalisis dipilih secara purposive, berdasarkan intensitas, kandungan naratif, dan kedalaman argumen yang ada. Proses ini tetap menjunjung tinggi etika penelitian digital, termasuk menjaga anonimitas para pengguna.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis, yang bertujuan untuk mengungkap struktur kekuasaan serta ideologi yang tersembunyi dalam bahasa dan narasi yang disampaikan oleh pengguna. Setiap komentar dan narasi dalam unggahan diteliti secara mendalam untuk mengenali kategori seperti cancel culture, bentuk ekspresi emosi (shaming, blaming), argumentasi moral, dan pengabaian fakta. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendokumentasikan apa yang diungkapkan, melainkan juga menyelidiki alasan serta konteks di balik penyampaian tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Fairclough dalam teori wacana kritis, bahasa bertindak sebagai alat kekuasaan dan representasi ideologi dalam masyarakat (Pals, 2012). Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi narasi yang muncul.

Dalam pelaksanaannya, peneliti membuat transkrip digital dari komentar yang sudah dipilih, kemudian melaksanakan pengkodean terbuka untuk menemukan tema-tema utama. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan menjadi kategori analitis seperti "ketidaktoleransian terhadap pendapat yang berbeda," "logika moralistik," "narasi emosional," dan "penguatan identitas kelompok." Setiap kategori dihubungkan dengan kerangka teori rasionalitas publik, polarisasi sosial, dan politik identitas. Pendekatan ini membangun hubungan antara data empiris dan konsep teoretis secara mendalam. Teknik ini sejalan dengan model grounded theory yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman konseptual dari data sosial (Sugiyono, 2021).



Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi konteks, yakni dengan membandingkan berbagai unggahan dari akun yang berbeda mengenai isu serupa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil yang ditemukan bukanlah akibat dari suatu kasus ekstrem yang terisolasi, melainkan merupakan representasi dari pola diskursus yang berulang dalam ruang digital. Peneliti juga melakukan perbandingan antara narasi di komentar dengan berita atau fakta yang relevan untuk menguji sejauh mana masyarakat terlibat dalam logika post-truth. Kesesuaian antara pendapat dan data faktual merupakan indikator yang signifikan dari krisis rasionalitas. Teknik ini mendukung pendekatan induktif yang sangat memperhatikan konteks sosial. Sebagai penelitian kualitatif yang berfokus pada platform digital, kajian ini memahami bahwa realitas sosial dalam media sosial bersifat luwes, dinamis, dan cepat berubah. Oleh karena itu, pengolahan data dilakukan dengan cara reflektif dan terbuka dalam menghadapi kemungkinan adanya makna ganda atau ambiguitas dalam pesan yang disampaikan secara digital. Peneliti berfungsi sebagai partisipan observatif yang secara aktif menafsirkan wacana, bukan sekadar pengumpul data secara pasif. Hal ini sejalan dengan pendekatan interpretatif dalam penelitian komunikasi sosial. Dengan pendekatan ini, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana budaya woke mengkonstruksi, dan dikonstruksi oleh, struktur komunikasi digital yang ada pada saat ini.

PEMBAHASAN

1. Budaya Woke dan Reduksi Diskursus Publik

Budaya woke, yang dulunya merupakan bentuk kesadaran tentang ketidakadilan yang ada dalam struktur sosial, telah mengalami perubahan besar di dunia digital. Alih-alih mendorong partisipasi yang kritis dan reflektif, budaya ini berubah menjadi alat pengendalian moral yang sangat ketat. Di berbagai media sosial, kesadaran sosial ini disederhanakan menjadi sarana untuk mengklasifikasikan orang-orang antara yang “sadar” dan “tidak sadar.” Dalam pengertian ini, budaya woke tidak lagi mendorong diskusi yang mendalam, tetapi malah cenderung menciptakan perpecahan moral yang mempersempit ruang untuk berdialog. Seperti yang diungkapkan oleh Nurudin (2004), komunikasi massa digital membuat kompleksitas menjadi narasi biner yang mudah dipahami, meskipun kurang memiliki kedalaman dalam argumentasinya.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp 1-20

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Fenomena ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang lebih memprioritaskan kecepatan, emosi, dan popularitas daripada kualitas konten. Ungkapan singkat dan emosional yang penuh dengan makna simbolis cenderung lebih cepat menjadi viral dibandingkan argumen yang panjang dan memerlukan pemahaman kontekstual. Dalam suasana digital seperti ini, narasi woke muncul dalam bentuk tagar, emoji, atau slogan yang menunjukkan keberpihakan, tetapi mengabaikan kompleksitas isu yang sedang dibicarakan. Menurut Anisa (2021), budaya digital lebih mengutamakan penilaian moral seseorang berdasarkan kinerja ekspresi digitalnya daripada kedalaman logika argumennya. Ini mengalihkan diskursus publik dari deliberasi rasional menjadi kinerja moral kolektif. Perubahan ini menghasilkan lingkungan sosial yang tidak lagi mendukung kebebasan ekspresi. Orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dari narasi yang berlaku akan mudah dicurigai atau bahkan diserang secara personal. Budaya pembatalan atau cancel culture merupakan contoh nyata dari fenomena ini sebuah bentuk hukuman sosial yang berasal dari tekanan publik di dunia digital, bukan dari proses hukum resmi. Ridwan (2022) mengamati bahwa budaya digital telah menjelma menjadi arena penghakiman moral yang tidak memberikan tempat bagi ambiguitas. Dalam kondisi seperti ini, diskusi tidak lagi didasarkan pada rasa ingin tahu atau keinginan untuk memahami, melainkan beralih menjadi kompetisi untuk menunjukkan kesalehan moral di dunia digital. Lebih lanjut, algoritma di media sosial memperburuk kondisi ini dengan membentuk gelembung informasi, sehingga pengguna hanya melihat konten yang sejalan dengan keyakinan mereka. Hal ini mempercepat timbulnya polarisasi dan menyulitkan terjadinya diskusi antar pandangan. Rahmawati (2018) menyatakan bahwa dalam lingkungan algoritmik yang tertutup, perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman, bukannya kesempatan untuk belajar. Akibatnya, ruang publik di dunia digital berubah menjadi echo chamber yang memperkuat posisi ideologis dari masing-masing kelompok tanpa adanya interaksi yang positif dengan sudut pandang yang berbeda.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas diskursus publik adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak orang tidak mampu membedakan antara pendapat pribadi dan argumen yang berdasar pada data. Anshori dan Hidayat (2024) menyatakan bahwa masyarakat sering terjebak dalam arus pandangan umum karena kurangnya keterampilan untuk memverifikasi kebenaran informasi. Akibatnya, emosi



mendominasi dalam diskusi publik, di mana suara yang paling keras dan viral sering kali dianggap paling benar, tanpa mempedulikan akurasi atau keabsahan argumennya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas diskursus publik adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak orang tidak mampu membedakan antara pendapat pribadi dan argumen yang berdasar pada data. Anshori dan Hidayat (2024) menyatakan bahwa masyarakat sering terjebak dalam arus pandangan umum karena kurangnya keterampilan untuk memverifikasi kebenaran informasi. Akibatnya, emosi mendominasi dalam diskusi publik, di mana suara yang paling keras dan viral sering kali dianggap paling benar, tanpa mempedulikan akurasi atau keabsahan argumennya.

Akhirnya, seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa budaya woke dalam dunia digital sekarang lebih bersifat normatif dibandingkan dengan deliberatif. Ruang publik tidak lagi menjadi tempat bertemunya berbagai sudut pandang, melainkan sebuah arena untuk memverifikasi moralitas. Sunstein (2017) menyebut fenomena ini sebagai “republik yang terpecah,” di mana publik tidak mencari kebenaran yang sama, tetapi lebih pada pengakuan terhadap identitas moral masing-masing. Untuk mencegah kerusakan total dari fungsi deliberatif di ruang digital, penting untuk melakukan pemulihan literasi digital yang fokus pada kemampuan untuk berdialog, mengkritik, dan mendengarkan dengan empati serta akal sehat.

Tabel 1. Dampak Budaya Woke terhadap Kualitas Diskursus Publik

Aspek Diskursus Publik	Kondisi Sebelum Dominasi Woke	Kondisi Setelah Dominasi Woke
Tujuan Diskusi	Pertukaran ide dan argumentasi	Validasi moral dan simbol identitas
Gaya Bahasa	Rasional, analitis	Emosional, simbolik
Ruang Perbedaan	Terbuka dan deliberatif	Tertutup dan penuh eksklusif
Respon terhadap Ketidaksepakatan	Dialog kritis	Cancel culture & shaming
Peran Media Sosial	Kanal komunikasi publik	Alat penguatan moral kolektif

2. Polarisasi Sosial dan Penyederhanaan Narasi di Era Media Sosial

Perkembangan teknologi digital, terutama dalam hal media sosial, telah mengubah cara orang mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun, seperti yang dinyatakan oleh



Nurudin (2004), perubahan ini tidak sepenuhnya membawa dampak positif. Media sosial cenderung menyederhanakan isu-isu yang rumit menjadi cerita yang bersifat hitam-putih, baik dan buruk, benar dan salah, kami dan mereka. Proses ini menguatkan pemikiran biner yang mengabaikan ketidakjelasan, nuansa, dan kedalaman analisis. Diskusi publik pun kehilangan kompleksitasnya karena orang lebih memilih cerita emosional yang mudah dimengerti dan cepat untuk dibagikan. Dominasi emosi dalam interaksi digital semakin memperkuat posisinya, sejalan dengan kecenderungan algoritma platform media sosial yang fokus pada tingkat keterlibatan tinggi. Konten yang memicu kemarahan, kebahagiaan, atau frustrasi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi viral dibandingkan dengan narasi yang lebih reflektif atau berbasis data. Tufekci (2015) menyebut fenomena ini sebagai "seleksti afektif algoritmik," di mana teknologi tidak bersifat netral, tetapi mendukung konten yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Sebagai hasilnya, media sosial tidak lagi berfungsi sebagai ruang untuk diskusi ide-ide, tetapi lebih menjadi arena pertarungan emosi yang memperkuat prasangka dan memperlebar jurang perbedaan.

Fenomena ini didukung oleh kehadiran apa yang disebut oleh Papacharissi (2015) sebagai publik emosional, yaitu kelompok digital yang terbentuk dan dipicu oleh perasaan bersama, bukan oleh logika yang seragam. Dalam konteks ini, penalaran dan argumen rasional tidak memiliki ruang. Komunitas digital cenderung lebih setia kepada simbol, cerita emosional, dan ungkapan moral dibandingkan dengan data dan pemikiran kritis. Hal ini membuat diskusi publik berpindah dari proses deliberatif menjadi ritual penguatan terhadap nilai-nilai moral yang diyakini Bersama. Lebih dari sekadar emosional, cerita yang disederhanakan juga menghasilkan pemisahan sosial dalam bentuk ruang gema dan gelembung penyaring. Pariser (2011) mengingatkan bahwa algoritma di media sosial menampilkan informasi berdasarkan kecenderungan sebelumnya, sehingga membatasi paparan terhadap pandangan yang beragam. Dalam situasi ini, individu tidak hanya menentukan dengan siapa mereka berkomunikasi, tetapi juga hanya melihat hal-hal yang ingin mereka lihat. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan untuk menjumpai pandangan yang menantang atau berbeda secara signifikan.

Dampak langsung dari semua ini adalah meningkatnya polarisasi sosial. Sunstein (2017) mengungkapkan bahwa seringkali terpapar pada pandangan yang serupa memperkuat



posisi ekstrem, sebuah fenomena yang dikenal sebagai group polarization. Ini bukan sekadar masalah perbedaan pendapat, melainkan juga perpecahan yang semakin mendalam akibat absennya diskusi yang konstruktif. Dalam masyarakat yang terbagi, ruang untuk berdialog menjadi tertutup karena setiap pihak telah menetapkan identitas moral dan ideologisnya dengan cara yang mutlak. Dalam pengertian Indonesia, penyederhanaan cerita ini diperparah oleh rendahnya keterampilan literasi kritis para pengguna internet. McIntyre (2018) menyebut periode ini sebagai era pasca-kebenaran, di mana realitas objektif diungguli oleh perasaan dan keyakinan personal. Saat perasaan menjadi fondasi utama dalam membentuk pandangan masyarakat, maka bukti, data, dan alasan yang rasional menjadi kurang penting. Hal ini mengakibatkan ruang publik kehilangan makna pengetahuannya sebagai lokasi pencarian kebenaran, dan bertransformasi menjadi tempat pembentukan afiliasi emosional.

Sebagai jawaban atas tantangan ini, pendidikan literasi digital perlu difokuskan pada peningkatan kemampuan reflektif masyarakat. Mihailidis dan Thevenin (2013) menekankan bahwa literasi media bukan sekadar akses informasi, melainkan juga mencakup kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi keaslian pesan, serta memahami konteks sosial dan politik dari konten yang diterima. Tanpa adanya pendidikan tersebut, masyarakat hanya akan berperan sebagai konsumen yang pasif terhadap simbol-simbol, bukan sebagai peserta aktif dalam diskusi publik yang bermakna.

Tabel 2. Pola Penyederhanaan Narasi dan Efek Polarisasi Sosial

Elemen Sosial	Sebelum Media Sosial	Setelah Media Sosial dan Budaya Woke
Kompleksitas Narasi	Multi-nuansa dan reflektif	Emosional dan dikotomis
Gaya Komunikasi	Argumentatif dan logis	Simbolik dan afektif
Ekosistem Informasi	Terbuka pada perspektif lain	Terkurung dalam <i>echo chamber</i>
Basis Penilaian Opini Publik	Fakta dan data	Emosi dan loyalitas moral
Peluang Dialog Lintas Pandangan	Tinggi	Rendah

3. Cancel Culture sebagai Mekanisme Kontrol Sosial Baru

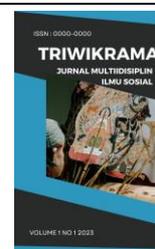
Fenomena pembatalan budaya timbul sebagai bentuk paling nyata dari perubahan budaya woke dalam dunia digital. Meskipun awalnya bertujuan untuk meminta akuntabilitas



sosial atas perilaku yang dianggap diskriminatif atau merugikan, dalam penerapannya, pembatalan budaya sering kali berubah menjadi bentuk hukuman sosial yang dilakukan tanpa adanya proses klarifikasi yang adil. Ng (2020) menyatakan bahwa pembatalan budaya cenderung bersifat mendesak, emosional, dan tidak seimbang. Hal ini menciptakan situasi di mana seseorang dapat kehilangan reputasi, pekerjaan, atau jaringan sosial hanya karena satu ungkapan atau tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan norma moral komunitas digital pada saat itu.

Alih-alih menyediakan arena untuk diskusi dan refleksi, budaya pembatalan berfungsi sebagai cara untuk menghapus mengeluarkan orang dari komunitas sosial berdasarkan opini publik yang menyebar dengan cepat. Clark (2020) menyebutnya sebagai jenis "pengadilan digital secara massal" yang tidak memberi kesempatan untuk membela diri, memperjelas, atau menilai konteksnya. Ketika pengguna media sosial secara bersama-sama sepakat bahwa seseorang harus dibatalkan, proses itu biasanya tidak memperhatikan logika diskusi atau penyelidikan yang mendalam, tetapi lebih kepada seberapa cepat sesuatu menjadi viral dan tekanan dari publik yang segera. Fenomena ini membuat garis antara kritik yang sah dan kekerasan simbolik menjadi tidak jelas. Tindakan seperti doxxing (pembocoran informasi pribadi), pelecehan di internet, pemboikotan ekonomi, sampai ancaman fisik menjadi bagian dari "hukuman" atas kesalahan yang biasanya tidak melalui proses verifikasi yang adil. Norris (2021) mengingatkan bahwa etika digital dalam budaya pembatalan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan anggapan tak bersalah. Hal ini membuat komunitas digital berubah menjadi mobokrasi yang menciptakan bentuk otoritarianisme baru atas nama kesadaran moral.

Di sisi lain, budaya pembatalan mencerminkan perubahan norma sosial dari lembaga formal menuju komunitas informal yang beroperasi secara seimbang. Dalam hal ini, kekuasaan tidak lagi terpusat pada negara atau institusi, melainkan tersebar di antara para pengguna digital. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Williams (2021), penyebaran kekuasaan ini memberikan peluang bagi manipulasi pendapat publik dan ketidakseimbangan kekuatan dalam menetapkan apa yang dianggap "salah." Akibatnya, budaya pembatalan tidak mendorong keadilan yang sejati, tetapi malah menjadi alat ideologis untuk menekan pandangan yang berbeda. Dalam sistem demokrasi, budaya pembatalan menjadi risiko bagi dasar-dasar diskusi



dan hak untuk berpendapat. Jaffe (2021) menunjukkan bahwa dorongan untuk berbicara dengan cara yang "benar secara politik" telah berkembang menjadi kewaspadaan yang berlebihan, di mana setiap individu yang mengungkapkan pandangan berbeda menghadapi kemungkinan kehilangan pengakuan sosial. Ini menciptakan budaya membungkam diri (self-censorship), terutama bagi mereka yang memiliki pendapat yang tidak umum. Secara keseluruhan, demokrasi yang sehat tidak akan dapat bertahan dalam kondisi yang membunuh dialog kritis.

Namun demikian, perlu diakui bahwa tidak semua jenis pembatalan bersifat merusak. Dalam beberapa situasi, budaya pembatalan berhasil memberikan ruang bagi suara korban kekerasan atau diskriminasi dan mendorong akuntabilitas di masyarakat. Yang (2022) mencatat bahwa budaya sadar dan pembatalan memiliki peran ganda: sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan juga sebagai refleksi dari kecemasan kolektif terhadap ketidakadilan. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan dan menghindari penilaian moral terhadap individu hanya berdasarkan satu kesalahan. Menghadapi tantangan ini, Keller (2021) menyarankan penguatan pendidikan etika digital sebagai upaya melindungi kebebasan berpendapat sekaligus tanggung jawab sosial. Pendidikan ini tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga meliputi kemampuan untuk membedakan antara kritik yang valid dan pembatalan yang merugikan. Pendidikan masyarakat seharusnya menekankan pentingnya keadilan dalam prosedur, empati, serta ruang untuk klarifikasi sebelum memberi sanksi sosial di komunitas digital.

4. Erosi Kebebasan Berpendapat dan Ketakutan Ekspresif

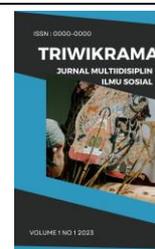
Salah satu pengaruh terkuat dari pengaruh budaya woke dan cancel culture di dunia maya adalah hilangnya kebebasan berpendapat. Meskipun secara hukum kebebasan berekspresi diakui, dalam kenyataannya, orang-orang mengalami tekanan sosial yang signifikan saat mereka mengungkapkan pendapat yang berbeda dari narasi yang umum. Anisa (2021) mengungkapkan bahwa terjadi pergeseran dari kebebasan berekspresi menuju kebebasan dari kritik, yaitu situasi di mana orang lebih memilih untuk tidak berbicara demi menghindari hukuman sosial, daripada menyampaikan pandangan yang mungkin menghadapi penolakan publik. Fenomena ini disebut sebagai spiral keheningan, sebuah konsep yang mengindikasikan bahwa orang cenderung menghindari bicara jika merasa pandangan mereka



tidak sejalan dengan mayoritas. Di zaman digital, fenomena ini semakin diperkuat oleh cepatnya respon negatif dan ancaman langsung seperti doxxing, pencemoohan massal, atau pemboikotan online. Moy et al. (2016) menunjukkan bahwa media sosial menghasilkan tekanan untuk menyesuaikan diri yang lebih besar dibandingkan dengan ruang publik tradisional, karena paparan terhadap reaksi pengguna lain sangat intens dan terjadi secara langsung.

Di sisi lain, algoritma yang digunakan oleh media sosial justru memperburuk keadaan ini dengan menonjolkan konten yang ekstrim dan mengesampingkan pandangan yang lebih seimbang. Gillespie (2018) menyatakan bahwa desain algoritma bertujuan untuk meningkatkan interaksi, sehingga lebih mengutamakan konten yang dapat menimbulkan kontroversi atau emosi. Sebagai hasilnya, pandangan alternatif atau suara dari kelompok minoritas tidak hanya sulit untuk ditemukan, tetapi juga rentan mendapat cap sebagai “masalah” oleh komunitas daring yang telah terpecah secara moral. Implikasi dari situasi ini sangat merugikan bagi penerapan demokrasi. Habermas (2006) menekankan bahwa diskusi publik yang baik membutuhkan keberanian untuk memiliki pandangan yang berbeda dan berdialog secara logis. Apabila orang-orang merasa segan untuk mengemukakan pendapat karena takut akan kritik atau pengucilan, maka dasar dari demokrasi partisipatif yaitu komunikasi yang terbuka dan kritis tidak akan bisa bertahan dengan kuat. Demokrasi pun terjebak dalam kondisi semu, di mana kebebasan hanya eksis dalam bentuk simbolik, tanpa terealisasi dalam praktik sosial yang sesungguhnya. Dari perspektif psikososial, dorongan untuk menyesuaikan diri dan rasa takut untuk berbicara dengan salah dapat menghasilkan dampak psikologis yang signifikan. Luqman et al. (2022) mengungkapkan bahwa kekhawatiran akan penilaian publik membuat individu cenderung kehilangan motivasi untuk menyampaikan pendapat, meskipun mereka memiliki kemampuan yang sangat baik dalam bidang tersebut. Hal ini menciptakan jurang antara kemampuan pengetahuan dan penyampaian pendapat, yang pada akhirnya merintangai pertumbuhan budaya dialog yang konstruktif.

Ironisnya, platform media sosial yang semula diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendemokratisasi informasi malah bertransformasi menjadi alat pengawasan yang bersifat horizontal. Zuboff (2019) menyebut fenomena ini sebagai model baru dari "kapitalisme pengawasan," di mana orang-orang saling mengawasi perilaku satu sama lain berdasarkan



norma moral komunitas yang kadang tidak logis atau adil. Dalam situasi semacam ini, penindasan tidak lagi berasal dari kekuasaan negara, tetapi muncul dari tekanan sosial internal di antara para pengguna. Untuk memulihkan fungsi yang sehat dalam kebebasan berpendapat di dunia digital, Wardle dan Derakhshan (2017) merekomendasikan pentingnya pendidikan digital yang fokus pada toleransi, kesadaran akan etika, dan metode komunikasi yang menyeluruh. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menangani konflik, memahami konteks, dan menghormati perbedaan dalam pembicaraan. Tanpa adanya hal tersebut, ruang digital akan terus dikuasai oleh simbolisme moral yang mengekang.

5. Simbolisme Moral dan Krisis Logika Argumentatif

Dominasi simbolisme moral dalam budaya woke menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat menyikapi nilai, otoritas, dan kebenaran. Representasi seperti tagar (#), emoji, slogan yang populer, dan gestur digital tidak hanya berfungsi sebagai alat ekspresi, tetapi juga menjadi penanda posisi moral seseorang. Papacharissi (2015) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari publik afektif, yaitu komunitas daring yang terbentuk dan dipengaruhi oleh perasaan bersama, bukan melalui pembahasan rasional. Dalam komunitas semacam ini, emosi berperan lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan moral ketimbang logika atau argumen. Ketika tanda-tanda dijadikan sebagai cara utama untuk menilai etika seseorang, sering kali logika dalam berargumen menjadi terabaikan. Cerita yang panjang, yang mengandalkan bukti, atau yang mengandung ketidakjelasan tidak dipandang sebagai “efektif” secara emosional, sehingga kurang menarik perhatian masyarakat. Ahmed (2014) menyatakan bahwa di dalam budaya yang berorientasi pada emosi, kebenaran tidak lagi diuji melalui metode rasional atau ilmiah, melainkan melalui kekuatan perasaan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, ruang publik digital bukan lagi tempat untuk bertukar ide, tetapi menjadi medan pertempuran simbol-simbol dan kekuatan emosi.

Hal ini mendorong lahirnya budaya pamer di mana orang merasa terdorong untuk menunjukkan posisi mereka melalui simbol-simbol, bukan melalui isi yang sebenarnya. Clark (2020) menyebut fenomena ini sebagai “keadilan pamer”, yaitu bentuk keadilan sosial yang lebih menekankan penampilan luar dari kesadaran moral daripada kedalaman pemahaman terhadap masalah. Akibatnya, hashtag atau slogan yang viral sering dinilai sebagai tanda



kepedulian, meskipun tidak diikuti dengan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah sosial. Symbolisme etis ini juga menghasilkan tekanan dari masyarakat untuk menuruti cerita yang dominan. Seperti yang diungkapkan oleh Kuo (2021), ekspresi terbuka mengenai masalah-masalah yang sedang hangat tidak lagi hanya berfokus pada aspek moral, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal social suatu cara untuk mengindikasikan bahwa seseorang termasuk dalam kelompok yang dianggap ‘benar secara moral’. Sebagai hasilnya, banyak orang merasa harus menunjukkan keterikatan moral mereka secara simbolis, meskipun mereka tidak benar-benar memahami isu yang sedang dibahas.

Dalam konteks komunikasi yang demikian, kesempatan untuk berlogika, mengekspresikan nuansa, serta mengungkap keraguan menjadi sangat terbatas. Pandangan yang rasional tetapi bertentangan dengan nilai-nilai publik sering kali dianggap ‘dingin’, ‘tidak manusiawi’, atau bahkan ‘berbahaya’. Furedi (2018) menunjukkan bahwa ketakutan untuk berdebat menyebabkan pengurangan keberanian dalam berpikir kritis dan penciptaan norma-norma sosial baru yang berdasar pada kesesuaian moral. Sebagai hasilnya, diskursus publik kehilangan keragaman sudut pandang dan menjadi seragam dalam nilai serta dangkal dari segi analisis. Menurut Dean (2010), simbolisme moral yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan terjadinya kapitalisme komunikasi, yaitu situasi di mana komunikasi hanya berlangsung sebagai aliran tanda dan ungkapan tanpa dampak nyata terhadap tindakan atau pemikiran kritis. Di dalam situasi ini, pembicaraan hanya berfungsi sebagai perayaan perasaan bersama, dan bukan sebagai alat untuk menemukan solusi. Proses sosial dan politik terperangkap dalam ilusi keterlibatan, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah pengulangan ekspresi yang tidak membawa hasil.

Untuk mencapai keseimbangan antara makna moral dan alasan yang logis, sangat penting untuk memperbarui ruang diskusi publik. Habermas (1990) menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang rasional, yaitu dialog antara orang-orang yang saling menghargai. Dalam dunia digital, hal ini mengharuskan kita untuk membangun lingkungan yang mendukung kritik, ketidakpastian, dan pernyataan emosional sambil tetap mempertahankan rasionalitas. Pendidikan digital perlu mengajarkan nilai-nilai ini agar komunikasi tidak terperangkap dalam euforia simbolis yang salah arah.

Tabel 3. Perbandingan Symbolisme Moral dan Logika Argumentatif dalam Ruang Digital



Aspek	Simbolisme Moral	Logika Argumentatif
Basis Penilaian	Intensitas emosi dan ekspresi simbol	Validitas argumen dan data
Bentuk Partisipasi	Tagar, emoji, slogan	Opini tertulis, diskusi, kajian logis
Tujuan Komunikasi	Menunjukkan afiliasi moral	Membangun pemahaman kolektif
Sifat Interaksi	Performatif dan afirmatif	Reflektif dan deliberatif
Risiko Dominasi	Homogenitas narasi dan eksklusi perbedaan	Potensi konflik tetapi terbuka terhadap kritik
Tantangan	Dangkal, cepat viral, mudah disalahgunakan	Lambat, sulit viral, tapi substansial

6. Ambiguitas Identitas dalam Budaya Digital

Budaya woke di dunia maya tidak hanya memengaruhi perbincangan publik, tetapi juga mengubah cara individu mengekspresikan identitas mereka. Dalam konteks ini, bersikap netral atau tidak berpihak pada isu sosial sering kali dianggap sebagai tindakan melawan norma moral. Menurut Haidt dan Rose-Stockwell (2019), di dalam lingkungan yang sangat terpolarisasi secara etika, sikap tidak mengambil posisi bisa dianggap sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian, pengungkapan identitas di dunia digital menjadi bersifat normatif dan mengalami tekanan sosial yang besar.

Ambiguitas dalam pengenalan diri ini timbul karena adanya tekanan untuk terus menerus mengekspresikan afiliasi. Identitas yang bersifat fleksibel dan memiliki banyak dimensi dipersempit menjadi satu posisi moral yang harus ditunjukkan secara terbuka. Fukuyama (2018) menyebut keadaan ini sebagai esensialisme identitas, yaitu kecenderungan untuk menyederhanakan identitas individu hanya berdasarkan satu faktor moral atau ideologis. Dalam hal ini, seseorang tidak lagi dinilai berdasarkan integritas pribadinya atau kedalaman pemikirannya, tetapi berdasarkan kesesuaian simbolis dengan narasi masyarakat yang dominan. Tekanan ini menghasilkan lingkungan sosial yang tertutup, di mana orang-orang yang tidak secara aktif mengungkapkan afiliasi moral dapat dianggap kurang penting atau dihapus dari diskusi publik. Kuo (2021) menyebut fenomena ini sebagai penyelarasan performative proses di mana seseorang merasa terpaksa untuk menunjukkan kesetiaan moral agar diakui sebagai anggota komunitas. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan hilangnya ekspresi yang asli dan munculnya identitas yang dibentuk oleh tekanan untuk mengikuti norma-norma digital.



Bagi banyak orang, terutama yang masih muda, keadaan ini menyebabkan adanya kebingungan identitas. McWilliams (2021) mencatat bahwa banyak remaja merasa perlu untuk menyelaraskan gambar mereka di dunia maya dengan harapan moral dari masyarakat agar tidak ditolak. Hal ini menyebabkan ketegangan identitas antara perasaan pribadi dan citra yang harus ditunjukkan di publik. Sebagai akibatnya, dunia digital tidak lagi menjadi sarana untuk berekspresi secara tulus, tetapi berubah menjadi wilayah negosiasi identitas yang sarat dengan tekanan sosial. Selain itu, budaya woke yang kaku menghasilkan pemisahan yang tidak nyata: Anda berpihak kepada kami atau Anda menentang kami. Perspektifnya tidak mengakomodasi kompleksitas atau ambiguitas, yang membuat sulit bagi siapapun yang ingin bersikap reflektif atau meragukan cerita yang dominan. Lukianoff dan Haidt (2018) mengistilahkan ini sebagai tanda dari kelemahan intelektual, yaitu ketidakpuasan terhadap variasi pemikiran yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk menerima perbedaan.

Untuk mengatasi jebakan ambiguitas identitas ini, Roberts (2022) merekomendasikan pengembangan etika kesadaran reflektif di dalam komunitas digital. Kesadaran tersebut mengedepankan pengakuan terhadap kompleksitas moral individu dan memberikan penghormatan kepada kebebasan untuk tidak selalu mengungkapkan posisi secara terbuka. Dengan cara ini, ruang digital bisa berkembang menjadi ekosistem yang benar-benar inklusif, tidak hanya dalam simbol, tetapi juga dalam struktur dan nilai-nilai komunikasinya.

KESIMPULAN

Budaya woke di ranah digital telah berkembang dari sebuah gerakan kesadaran sosial menjadi semacam sistem moral yang mengatur dan membatasi diskusi di ruang publik. Peristiwa ini menghasilkan perpecahan antara “yang sadar” dan “yang tidak sadar,” serta mengaburkan batasan antara kritik dan serangan pribadi. Nilai-nilai moral kini lebih menjulang, menggantikan argumen logis dan fakta yang seharusnya menjadi dasar bagi diskusi publik yang konstruktif. Polarisasi di masyarakat semakin menguat berkat algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten yang emosional dan ekstrem, sehingga mempersempit ruang untuk pandangan yang lebih moderat dan reflektif. Dalam situasi seperti ini, kebebasan berekspresi merosot, karena pernyataan yang dianggap tidak sejalan dengan kebanyakan sering kali mendapat reaksi sosial yang negatif. Seseorang terpaksa merubah identitas simbolisnya

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp 1-20

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



agar tetap diterima dalam komunitas daring. Akibatnya, diskusi publik beralih dari refleksi menuju konformitas emosi dan afiliasi simbolis.

Budaya pembatalan (cancel culture) muncul sebagai bentuk represi yang terkait dengan dinamika ini, beroperasi tanpa adanya keadilan yang jelas atau kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kekuasaan horizontal dalam bentuk pengadilan moral yang dilakukan oleh masyarakat digital, bukan oleh lembaga resmi. Banyak individu dan tokoh terkenal merasa perlu untuk melakukan penyensoran diri demi menghindari pengucilan sosial, meskipun pandangan mereka didasarkan pada data dan argumen. Hal ini menunjukkan bahwa budaya digital saat ini lebih mengutamakan kesetiaan simbolik ketimbang keberanian intelektual. Dalam jangka panjang, keadaan semacam ini bisa mengancam prinsip demokrasi deliberatif yang memerlukan keberagaman perspektif dan keberanian untuk berdebat secara sehat. Bahkan penyampaian nilai-nilai spiritual dan moral pun mengalami tekanan untuk beradaptasi dengan moralitas digital yang sering berubah. Ketika konten dakwah ditentukan oleh algoritma dan respons publik, nilai-nilai transenden berisiko mengalami negosiasi yang bersifat politis.

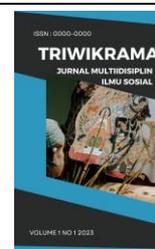
Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang bersifat multidisipliner yang menyatukan etika komunikasi, reformasi pendidikan digital, dan penguatan platform yang mendorong inklusivitas dalam diskursus.. Sangat penting bagi para aktor sosial seperti akademisi, dan tokoh opini untuk menjaga integritas intelektual mereka dan tidak terpengaruh oleh tekanan populisme moral di dunia digital. Platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya mengutamakan viralitas, tetapi juga memberi ruang untuk perbedaan dan nuansa. Dengan cara ini, budaya woke dapat kembali ke tujuan awalnya sebagai gerakan kesadaran, bukan sebagai alat penindasan. Keseimbangan antara simbol dan makna, antara emosi dan logika, harus dijaga demi terciptanya ruang digital yang benar-benar demokratis. Ini bukan sekadar masalah teknologi, tetapi terkait dengan masa depan kebebasan berpikir dalam masyarakat digital.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S. (2014). *The cultural politics of emotion* (2nd ed.). Edinburgh University Press.
- Alatas, S. H. (2019). *Agama dan ruang digital: Perspektif kritik sosial*. Pilar Pustaka.



- Anisa, R. (2021). Ekspresi simbolik dalam media sosial: Studi tentang hashtag dan moral publik. *Literasi Digital Press*.
- Anisa, R. (2021). Freedom of expression in the age of social media: Between democracy and digital punishment. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 13(2), 45–60.
- Anshori, S., & Hidayat, M. (2024). Literasi digital dan kualitas diskursus publik: Studi kasus di media sosial Indonesia. *Jurnal Komunikasi Digital*, 6(1), 13–30.
- Aziz, M. (2020). Dakwah populer di tengah era influencer: Antara idealitas dan komersialisasi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 5(3), 113–128.
- Basori, H. (2023). Menggeser literasi digital dari kompetensi teknis ke kritis: Tantangan pendidikan abad 21. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 9(2), 87–101.
- Clark, M. (2020). Drag them: A brief etymology of cancel culture. *Communication and the Public*, 5(3–4), 88–92. <https://doi.org/10.1177/2057047320961562>
- Dean, J. (2010). *Blog theory: Feedback and capture in the circuits of drive*. Polity Press.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: Contemporary identity politics and the struggle for recognition*. Farrar, Straus and Giroux.
- Furedi, F. (2018). *How fear works: Culture of fear in the twenty-first century*. Bloomsbury Publishing.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Habermas, J. (1990). *Moral consciousness and communicative action* (C. Lenhardt & S. W. Nicholsen, Trans.). MIT Press.
- Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. *Communication Theory*, 16(4), 411–426.
- Haidt, J., & Rose-Stockwell, T. (2019, December). The dark psychology of social networks. *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/12/social-media-democracy/600763>
- Jaffe, A. (2021). Speech, silence, and censorship in the age of cancel culture. *Ethics & International Affairs*, 35(4), 449–457. <https://doi.org/10.1017/S0892679421000494>
- Keller, J. (2021). Digital ethics and the threat of cancel culture. *Journal of Media Ethics*, 36(2), 63–75. <https://doi.org/10.1080/23736992.2021.1908391>



- Kuo, R. (2021). Performative solidarity and the digital moral economy. *New Media & Society*, 23(8), 2317–2335. <https://doi.org/10.1177/1461444820929300>
- Livingstone, S. (2018). Media literacy: An essential skill for the 21st century. *Nordicom Review*, 39(2), 71–78. <https://doi.org/10.2478/nor-2018-0012>
- Luqman, A., Farooq, R., & Rehman, S. U. (2022). Fear of public judgment and silence on social media. *Computers in Human Behavior*, 129, 107144. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107144>
- Lukianoff, G., & Haidt, J. (2018). *The coddling of the American mind: How good intentions and bad ideas are setting up a generation for failure*. Penguin Books.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. MIT Press.
- McWilliams, J. (2021). The identity crisis of Generation Z in digital spaces. *Journal of Youth Studies*, 24(6), 823–839. <https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1769792>
- Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. *American Behavioral Scientist*, 57(11), 1611–1622. <https://doi.org/10.1177/0002764213489015>
- Moy, P., Scheufele, D. A., & Holbert, R. L. (2016). Silent voices in the social media age: Revisiting the spiral of silence theory. *Communication Research*, 43(3), 351–372. <https://doi.org/10.1177/0093650215616451>
- Mukti, F. (2021). Etika dakwah digital: Integrasi maqashid syariah dan teknologi komunikasi. *Jurnal Dakwah dan Teknologi Islam*, 10(1), 34–49.
- Ng, E. (2020). No grand pronouncements here... Reflections on cancel culture and digital media participation. *Television & New Media*, 21(6), 621–627. <https://doi.org/10.1177/1527476420918828>
- Norris, C. (2021). The ethics of digital shaming and public accountability. *Philosophy & Technology*, 34(1), 71–94. <https://doi.org/10.1007/s13347-019-00378-1>
- Nurudin. (2004). *Komunikasi massa di era digital*. UMM Press.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Books.
- Rahmawati, D. (2018). Algoritma dan polarisasi sosial di media digital. *ITS Press*.
- Rheingold, H. (2012). *Net smart: How to thrive online*. MIT Press.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 8, Number 3, 2025 pp 1-20

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



-
- Roberts, D. (2022). From moral panic to moral maturity: Rethinking digital judgment in online communities. *Digital Ethics Journal*, 5(2), 45–61.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Tufekci, Z. (2015). Algorithmic harms beyond Facebook and Google: Emergent challenges of computational agency. *Colorado Technology Law Journal*, 13, 203–218.
- Wahid, M. (2021). Netralisasi nilai dalam dakwah digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Islam*, 7(1), 77–91.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-report/1680764666>
- Yang, G. (2022). Awakening the sleeping giant: How social media has reframed accountability. *Information, Communication & Society*, 25(3), 392–408. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1841782>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.